

Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Wiwie S.Iryanti

di bawah bimbingan : 1. Dra. M. S. Pangkey, M.Si

2. Dr. Verry Y. Londa, S.sos, M.Si

ABSTRACT The point of the special autonomy for Papua region which are intended to improve the standard of living in terms of improving the welfare and progress of the people of Papua, the freedom to empower wealth, accelerating economic development and respect for the rights - basic rights of the people of Papua, but in reality the impact of the implementation of the policy for \pm 13 years has not been fully felt by the indigenous people of Papua.

This study used quantitative methods with sampling done by 5 (five) village 1 (one) villages in the region of East Mimika district of Papua Mimika Provini. The study sample of 100 respondents assign less capable of being taken at random, from 5 villages and 1 sub-district with a number of different respondents Wania village where the village as much as 9 respondents, 15 respondents mware village, village Tipuka were 21, 16 Kaugapu village people, village Hiripau 6 and hometown Pomako 33 people. Making the sample size is determined by the number of residents in each village / urban village. Collecting data on the use of simple linear regression statistical analysis and product moment correlation.

Based on the analysis of the data showed: (1) the regression coefficient of the special autonomy impact on the welfare of indigenous Papuans is 0.689 scale. (2) the correlation coefficient of the special autonomy for the welfare of the indigenous people of Papua is 0.345 and the coefficient of determination is 0.119 or 11.9%.

Based on these results it can be deduced that the impact of the special autonomy policy on the welfare of indigenous Papuans enough impact on the indigenous Papuans. Based on the conclusions suggest that the performance of the special autonomy be improved in order to give effect to the indigenous people of Papua is not a good standard of living.

Keywords: Special Autonomy, Papuans welfare

PENDAHULUAN

Pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Lahirnya otonomi khusus bagi Papua ini di latar belakang oleh faktor belum berhasilnya Pemerintah dalam memberikan

kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak - hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih memprihatinkan. Malahan, sebagian di antara mereka masih hidup di zaman batu. Selain itu, persoalan - persoalan

mendasar seperti pelanggaran hak - hak asasi manusia dan pengingkaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Papua masih belum dapat di selesaikan secara adil dan bermartabat. Pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang di akui dan di berikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Mengapa kepada provinsi Papua, harus di berikan status otonomi khusus, berdasarkan undang – undang No. 21 Tahun 2001. Undang – undang ini tidak lahir begitu saja dalam kevakuman. Ia lahir sebagai suatu produk sejarah melewati suatu proses sejarah yang panjang dalam konteks dinamika sosial – politik dan keamanan dari negara kebangsaan (Nation state) Indonesia. Ia lahir dalam konteks penegakan hukum, HAM dan demokrasi. Undang – undang ini lahir sebagai upaya penyelesaian konflik. Sebagai jalan keluar untuk menciptakan win – win situation antara rakyat Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI (NKRI) dan pemerintah RI yang tetap kokoh teguh mempertahankan integritas dan kedaulatan atas NKRI, di satu

pihak sangat jelas bahwa keinginan banyak orang Papua adalah kemerdekaan penuh dari RI, sebagaimana di sampaikan dalam kongres Papua II di jayapura (29 mei sampai 30 juni 2000). Kita menyadari, bahwa kedua belah pihak dengan alasannya masing – masing jika terus berpegang teguh dengan pendirian, sikap, dan prinsip termasuk dengan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, maka situasi konflik akan sulit untuk di hindari dan konflik tersebut akan berkembang menjadi sangat luas dan lebih dalam dengan segala implikasinya. Dalam setiap konflik, korban yang akan berjatuhan dari kedua belah pihak. Undang – undang tentang otonomi khusus juga sekaligus membuka ruang bagi perbaikan untuk masa depan yang lebih baik, serta membuka ruang untuk perbaikan dalam rangka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, persamaan hak, dan untuk membuka mengembangkan jati diri, harga diri, serta harkat dan martabat sebagai manusia.

Undang – undang ini juga membuka ruang untuk membangun kembali kepercayaan rakyat papua yang sangat merosot, di akibatkan oleh kekecewaan rakyat papua yang sangat merosot, di

akibatkan oleh kekecewaan mereka sangat dalam kepada pemerintah RI, dan sebaliknya membangun kembali kepercayaan pemerintah RI kepada rakyat Papua. UU ini membuka kesempatan dan sekaligus sebagai tantangan untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan dan manajemen daerah/local dalam rangka mengembangkan *good governance*, demokrasi dan *civil society* di Provinsi Papua (suebu, Gubernur Papua).

Secara umum sistem pemerintahan orde baru yang di sebut dengan otonomi daerah di percaya akan membawa rakyat pada kehidupan yang lebih baik, bermartabat, di mana ruang gerak untuk bekerja dan menikmati hasil sendiri lebih luas tanpa harus tereksplotasi oleh pusat. Rakyat sepertinya bemaafas lega bersama memahami bahwa otonomi daerah itu lebih baik dari sistem pemerintahan yang lama, yang lebih. Sedangkan yang dapat mengerti dengan baik dari substansi otonomi daerah adalah mereka kelas menengah keatas meskipun juga setengah - setengah minimal kita semua pernah berpikir tentang maksud dari otonomi sesungguhnya.

Otonomi khusus Papua sejatinya di tunjukan untuk mengatasi masalah- masalah

kesenjangan antara daerah Papua dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu undang-undang otonomi khusus merupakan bentuk kepedulian dan simpati pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua khususnya penduduk asli Papua ras malanesia. Dengan prinsip itu UU otonomi khusus memperluas ruang gerak partisipasi masyarakat asli Papua dalam segala bidang pembangunan.

Mengenai pernyataan di atas tentang tujuan dari pada kebijakan otonomi khusus untuk mengatasi kesenjangan sosial, meningkatkan taraf hidup, mengelola kekayaan alam di Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Mimika dalam penelitian ini maka penulis mengambil suatu daerah yang dijadikan sebagai tempat penelitian berjalannya kebijakan otonomi Khusus, daerah ini ialah sebuah kecamatan tetapi saat ini di sebut Distrik Mimika Timur (Mapuru jaya) yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Mimika sebagai jalur utama pintu masuk pintu masuk perdagangan barang dan jasa dengan menggunakan transportasi laut, karena pelabuhan samudera yang cukup strategis. Dengan demikian, maka pertumbuhan penduduk pun terus meningkat

mengikuti perkembangan arus barang dan jasa yang masuk ke wilayah Timika.

Adapun kondisi riil Distrik Mimika Timur (Mapuru Jaya) dengan Luas wilayah adalah 1.789 Km² dengan presentase 9.13% dari luas keseluruhan Wilayah Kabupaten. Wilayah Distrik Mimika Timur terbagi dalam 6 wilayah yaitu kelurahan Wania, Kampung Kaugapu, kampung Mware, kampung Tipuka, kampung Hiripau dan kampung Pomako. Dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten yaitu sejauh 20 km. Jumlah penduduk di Distrik Mimika Timur secara keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan hasil pendataan sebanyak 12.122 jiwa.

Menurut sumber data pelaksanaan bidang kemasyarakatan di wilayah distrik Mimika Timur dalam salah satu kegiatannya yaitu kegiatan Raskin maka berdasarkan data tersebut terdapat jumlah masyarakat Papua Miskin di berbagai kampung yaitu Kelurahan wania 112 warga, Kampung Mware 180 warga, Kampung Tipuka 125 warga, Kampung Kaugapu 196 warga, kampung Hiripau 250 warga, Kampung Pomako 450 warga.

Mencermati fenomena di atas terlihat bahwa kebijakan otonomi khusus memberikan dampak pada kesejahteraan

masyarakat asli Papua akan tetapi dampak yang di hasilkan belum terjadi sebagaimana yang di harapkan oleh semua

komponen karena nya di perlukan suatu kajian ilmiah yang dapat mengungkapkan dan menjawab permasalahan ini maka untuk terarahnya penelitian ini peneliti membatasi kajian penelitian ini dengan judul "Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Masyarakat Asli Papua "

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian survei. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kebijakan otonomi khusus terhadap masyarakat asli Papua di sebuah Distrik Mimika Timur (Mapuru Jaya), maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif.

B. Populasi & Sampel

Penelitian ini akan di laksanakan di Distrik (kecamatan) Mimika Timur-kabupaten Mimika Provinsi Papua, di mana kawasan distrik ini berada pada Wilayah pesisir Kabupaten Mimika sebagai jalur utama pintu masuk pintu masuk perdagangan barang dan jasa dengan

menggunakan transportasi laut dan banyak di tempati oleh masyarakat asli Papua.

Populasi penelitian ialah semua warga masyarakat Distrik yang berjumlah 12.122 jiwa dengan mayoritas suku Kamoro dan Asmat. Besar sampel responden sebanyak 100 orang

A. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data ialah kuesioner, selain itu digunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen pelengkap. Penggunaan instrumen penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Kuesioner, Interview, Studi dokumentasi.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini dan definisi operasional yang di gunakan adalah sebagai berikut :

Pertama : "kebijakan otonomi khusus di Distrik Mimika Timur sebagai variabel independen (prediktor/mempengaruhi)" yang di simbolkan dengan X, dengan definisi operasionalnya adalah pengaruh suatu kebijakan tentang kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengurus daerahnya guna lebih meningkatkan kemandirian daerahnya,

memberikan pengakuan dan penghormatan hak - hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar, mengadakan partisipasi rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan, membangun dan mengarahkan masyarakat untuk mengola kekayaannya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar,dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,.

Kedua : "kesejahteraan masyarakat asli Papua sebagai variabel dependen (konsekuen,output/dipengaruhi)" yang di simbolkan dengan Y, dengan definisi operasionalnya adalah suatu Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, yang dapat di ukur dari kualitas hidup dari segi materi , fisik, mental, dan spiritual.

C. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus statistik deskriptif dan statistik inferensial, yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis statistik deskriptif yang digunakan ialah analisis tabel frekuensi dan persentase. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui dan

mendeskripsikan tentang variabel implementasi kebijakan otonomi khusus, dan variabel kesejahteraan masyarakat asli Papua.

- b. Analisis statistik parametrik yang digunakan ialah analisis regresi linier sederhana dan korelasi sederhana

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Variabel Penelitian

Hasil penelitian yang di sajikan nanti merupakan hasil wawancara dengan seluruh responden, yang di lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang di persiapan sebagai pedoman. Hasil penelitian akan di deskripsikan dalam 2 kategori, yaitu: 1) kebijakan Otonomi khusus, dan 2) kesejahteraan Masyarakat asli Papua

1. Deskripsi Kebijakan Otonomi Khusus

Dampak kebijakan otonomi khusus yang di maksud ialah pengaruh yang kuat yang mengakibatkan keadaan positif atau negative mengenai suatu kebijakan otonomi khusus di mana adanya kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah untuk mengurus daerahnya guna lebih meningkatkan kemandirian daerahnya, memberikan pengakuan dan penghormatan hak - hak dasar orang asli Papua serta

pemberdayaannya secara strategis dan mendasar, mengadakan partisipasi rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan, membangun dan mengarahkan masyarakat untuk mengola kekayaannya sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya di daerah Papua di Kecamatan (distrik) Mimika Timur. Dampak kebijakan ini di tujukan kepada keberlangsungan kehidupan masyarakat yang mendapat perhatian besar dari pemerintah untuk itu di buatnya keputusan ini yaitu suatu kebijakan yang di rasa mampu membantu membenahi kehidupan masyarakat Asli Papua yang mencakup di dalamnya berbagai bentuk dampak kebijakan otonomi khusus ini yaitu bentuk regulatory , bentuk distributive dan bentuk constituent.

Distribusi data di atas menunjukan bahwa realisasi daripada kebijakan otonomi khusus sebagian besar cukup di rasakan oleh masyarakat asli papua dan merasa realisasi kebijakan ini cukup berdampak bagi kehidupan mereka, juga dari pengamatan yang kurang merasakan dampak kebijakan otonomi khusus ini ialah di karenakan oleh 2 faktor yaitu mereka yang tidak proaktif ikut

serta dalam mendftarkan diri untuk di data oleh pemerintah desa, juga jarang mengikuti kegiatan sosialisasi dari pemerintah atau karena kelalaian pemerintah distrik yang tidak peka melihat pertumbuhan penduduk yang tahun per tahunnya semakin meningkat. Atas dasar inilah maka dapat di simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Asli Papua cukup merasakan dampak dari pada kebijakan otonomi khusus ini.

2. Deskripsi Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua

Kesejahteraan masyarakat asli Papua yang di maksud di sini ialah suatu Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, yang dapat di ukur dari kualitas hidup dari segi materi, fisik, mental, dan spiritual. Yang di ukur dalam cakupan segi materi ialah rumah, pangan, dan sandang, dari segi fisik ialah kesehatan dan lingkungan, dari segi mental ialah fasilitas pendidikan dan budaya sedangkan yang termasuk dalam cakupan segi spiritual ialah moral , etika dan keserasian (adaptasi).

Berdasarkan hasil tabulasi maka di peroleh gambaran tentang kesejahteraan masyarakat Asli Papua. Dari 100 responden yang di teliti ada sebanyak 8 orang atau 8% yang dapat di katakan baik/sejahtera, 82 orang atau sebanyak 82% masyarakat yang

cukup sejahtera sedangkan yang rendah/kurang 10% orang dapat di katakan kurang sejahtera.

Hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Asli Papua di lihat dari 10 indikator dari segi materi, fisik, mental dan spiritual. Menunjukan bahwa masyarakat asli Papua ialah dapat di katakan cukup sejahtera.

B. Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukan bahwa realisasi dampak daripada kebijakan otonomi khusus cukup di rasakan oleh sebagian masyarakat juga di tunjukan oleh masyarakat Asli Papua yang cukup sejahtera dan sebagian merasa baik dalam realisasi kebijakan otonomi khusus dan sebagian kecil belum merasakan dampak dari pada kebijakan otonomi khusus.

Untuk mengetahui dampak kebijakan otonomi khusus terhadap kesejahteraan masyarakat asli Papua maka di lakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis statistic regresi linier sederhana dan korelasi product moment sederhana.

Hasil analisis data menggunakan analisis regresi linier untuk mengetahui pola hubungan fungsional dari variable dampak

kebijakan otonomi khusus terhadap variable kesejahteraan masyarakat Asli Papua. Berdasarkan analisis regresi linier maka di peroleh hubungan fungsional variable dampak kebijakan otonomi khusus (X) terhadap kesejahteraan masyarakat Asli Papua (Y), yaitu sebagai berikut: $\hat{Y} = 30,35 + 0,689 X$

Pada persamaan regresi linier ini data di ketahui bahwa koefisien arah regresi (b) adalah 0,689 dan koefisien konstanta (a) adalah 30,35 Jelas bahwa nilai koefisien arah regresi (b) 0,689 bertanda positif ini memiliki pengertian bahwa variable dampak kebijakan otonomi khusus mempunyai hubungan terhadap kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Hasil analisis data menunjukan bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,345 dengan interpretasi koefisien korelasi ini menunjukan bahwa hubungan antara kebijakan otonomi khusus dan kesejahteraan masyarakat hampir sempurna sehingga dapat di maknai bahwa variable kebijakan otonomi khusus memiliki hubungan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat asli Papua.

Besar pengaruh atau daya penentu variable kebijakan otonomi khusus di

tunjukan oleh nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,1190 Angka ini punya pengaruh tertentu sebesar 11,9 % terhadap kesejahteraan masyarakat asli papua melalui persamaan regresi $\hat{Y} = 30,35 + 0,689 X$ sisanya di tentukan oleh variable lain sebanyak 88,1%

Berdasarkan perhitungan uji signifikansi di mana $\alpha = 0,05$, $n = 100$ uji satu pihak; $dk = 100 - 2 = 98$ sehingga di peroleh hasil $t_{hitung} = 3,640$ dan $t_{table} = 0,1996$, dengan demikian $t_{hitung} \geq t_{table}$ maka H_0 di tolak, hal ini berarti ada hubungan walaupun hubungan tersebut rendah yaitu sebanyak 0,345.

C. Pembahasan

Sebagaimana yang telah di kemukakan di atas bahwa arah kebijakan otonomi khusus untuk wilayah Papua yang di maksudkan untuk memperbaiki taraf hidup dalam hal peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, kebebasan untuk memberdayakan kekayaan, percepatan pembangunan ekonomi dan penghormatan terhadap hak – hak dasar masyarakat papua melalui hasil penelitian yang di lakukan terhadap 100 responden ternyata kebijakan otonomi khusus cukup memberi dampak

terhadap kesejahteraan masyarakat asli papua.

Pembahasan mengenai hasil analisis korelasi r -pearson dan regresi linier sederhana berkaitan dengan hasil tersebut dapat di gambarkan bahwa hubungan antara variable X dan variable Y rendah namun dalam sebuah realita setelah melakukan penelitian peneliti menurut tanggapan dari 100 responden mengenai kebijakan otonomi khusus ini sebagian besar responden tidak terlalu memahami tentang adanya kebijakan ini, setelah di jelaskan oleh peneliti mengenai tujuan pemberian hak khusus ini maka jawaban responden mengenai pemberian hak khusus ini baik bahkan sangat baik bagi mereka, namun realitanya realisasi daripada kebijakan ini belum sepenuhnya di rasakan oleh masyarakat, pemerintah dalam hal ini sudah memberi bantuan dengan membangun tempat tinggal layak untuk masyarakat asli yang ada di Distrik Mimika Timur dan beberapa masyarakat yang tidak mendapati tempat tinggal ialah mereka yang tidak terdaftar dalam mendapatkan subsidi dari pemerintah (dana Otsus).

Otonomi khusus bagi provinsi papua pada dasarnya adalah pemberian

kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan rakyat papua untuk mengatur dan mengurus sendiri secara kreatif dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah provinsi papua sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat papua, memberdayakan potensi perekonomian , social dan budaya yang di miliki, termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli papua melalui wakil- wakilnya untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai

Peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah di provinsi papua harus juga di siasati agar memperlancar penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Dalam kaitan ini, penataan keuangan daerah menjadi penting. Langkah awal yang harus di lakukan dan sekaligus merupakan prasyarat dalam penataan pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan klarifikasi terhadap kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Secara makro kondisi perekonomian Papua masih jauh tertinggal di banding dengan daerah lainnya di Indonesia, khususnya di Jawa. Tingkat kemiskinan masyarakat papua tergolong sangat tinggi dan berada di deretan paling bawah di antara termiskin di Indonesia. Kondisi yang sangat ironis dengan potensi sumber daya alam yang begitu melimpah, tanah yang luas namun sedikit penduduknya (blair dan Philips, 2003).

Besarnya pendapatan yang dihasilkan di Papua tidak berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan penduduk Papua karena pengelolaannya yang buruk dan banyak terjadi kebocoran. Secara teoritik, kegiatan ekstraktif di tanah Papua sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk membawa kemakmuran ekonomi asalkan dapat dikelola dengan baik, jujur dan transparan.

Dalam realitanya jumlah penduduk yang sedikit tidak serta merta berarti bahwa penduduk Papua khususnya orang asli Papua, sejahtera. 80 % rumah tangga adalah rumah tangga yang miskin, beberapa faktor penyebabnya antara lain; 1) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di provinsi Papua

selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampilkan penghormatan terhadap HAM, 2) pengelolaan pemanfaatan hasil kekayaan alam belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua.

Berdasarkan pembahasan di atas maka Hasil penelitian ini bermaksud untuk melibatkan pemerintah bahwa pemerintah harus lebih meningkatkan lagi kinerja daripada kebijakan otonomi khusus, pemberian status hak dan kewenangan secara khusus terhadap masyarakat asli Papua menunjukkan adanya perhatian yang besar dari pemerintah, bantuan yang sangat berarti bagi masyarakat Papua yang dapat dikatakan jauh dari pada taraf hidup yang baik, Membantu masyarakat yang kurang paham dengan adanya kebijakan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat awam Papua, membina mengelola dana maupun kekayaan alam yang mereka miliki dan membuka peluang bekerja dengan mengadakan sarana /prasarana untuk

mengembangkan usaha tani maupun peternakan yang di miliki.

Untuk memprediksikan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli papua sebagai dampak dari peningkatan kinerja kebijakn khusus maka dapat di lakukan perhitungan persamaan regresi linier. Dengan memasukan nilai variable X dalam persamaan regresi hasil analisis data. Apabila kinerja kebijakan otonomi khusus di tingkatan sebesar nilai (score) maksimum yakni 40, maka dapat di prediksi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli papua yaitu sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 30,35 + 0,689 (40) = 57,91$$

Melalui perhitungan ketepatan prediksi di atas menunjukan bahwa apabila kinerja kebijakan otonomi khusus dapat di tingkatan sebesar niai maksimum variable tersebut hasil pengamatan (40) dari kondisi yang ada sekarang, untuk itu di harapkan ada peningkatan keluarga yang di katakana kurang mampu sebesar 57,91 skala, jika di hitung dalam skala ideal pengukuran variable ini (75) maka hasil prediksi meningkat sebanyak 77,22 %. Dengan prediksi sebanyak 77,22 % dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat asli papua dengan ini maka pemerintah harus

lebih meningkatkan kinerja kebijakan otonomi khusus bahkan pemerintah juga harus proaktif mengadakan dalam mendata penduduk di wilayahnya agar pembagian dana otonomi khusus merata serta menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) progress yang baik dari pemerintahan yang berkualitas maka resultnya ialah terciptanya masyarakat yang mandiri, berkualitas, sejahtera, makmur dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapatlah di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan tujuan pemberian kewenangan khusus kepada Daerah Papua ini sangatlah baik dan dapat berdampak positif jika kinerjanya maksimal bagi kelangsungan hidup masyarakat ras malanesia ini namun realitanya pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat di Distrik Mimika Timur. Hal ini di sebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang masih di bawah rata – rata, walaupun dari hasil distribusi

responden yang tinggi ialah kategori baik/cukup namun realita yang di amati peneliti dapat di katakan masyarakat yang tinggal di wilayah ini masih belum sejahtera.

2. Walaupun melihat kinerja otonomi khusus ± 13 tahun sudah cukup di rasakan masyarakat namun realitanya sebagian masyarakat masih merasa kekurangan, walaupun ada bantuan pemerintah yaitu penyediaan tempat tinggal namun taraf kehidupan belum baik seperti pangan, sandang, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. dsb.
3. Berdasarkan analisis regresi linier dan korelasi product moment menunjukan bahwa kebijakan otonomi khusus cukup berdampak positif dalam artian bahwa $\pm 8\%$ masyarakat dapat di katakan sejahtera, 82% cukup sejahtera, di ukur berdasarkan indikator kesejahteraan yaitu memiliki rumah, sandang dan papan tercukupi, bahkan secara fisik (kesehatan, lingkungan), mental (pendidikan, budaya) serta spiritual (moral, etika). Dengan demikian Jika pelaksanaannya kebijakan otonomi khusus lebih baik atau kinerjanya maksimal (efektif dan efisien, responsif)

maka akan lebih meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat asli papua, terjadi peningkatan taraf hidup kea rah yang lebih baik.

D. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil – hasil dalam penelitian ini maka dapat di kemukakan beberapa saran kepada pihak – pihak terkait (implementor) daripada kebijakan otonomi khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Responsive dari pada pemerintah setempat sangat di butuhkan dalam penyelenggaraan kinerja otonomi khusus yang menjadikan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
2. Dengan adaya perhatian khusus daripada pemerintah pusat terhadap masyarakat asli papua maka pemerintah setempat lebih meningkatkan kordinasi dengan instansi BPS Kota mimika, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan instansi terkait lainnya.
3. Pengelolaan pendapatan daerah hendaknya di kelola dengan baik, jujur dan transparan agar dampaknya di rasakan langsung oleh masyarakat asli Papua.

4. Pemerintah provinsi papua lebih maksimal lagi dalam penyusunan strategi dasar dalam pembangunan, melakukan pengawasan dan monitoring kinerja kebijakan otonomi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigman, peter dan Glyn davis (2004), The Australian Policy Handbook, Crows Nest: Allen and Unwin
- Badan Statistik Papua, “suku Bangsa Asli Papua Menurut Urutan Abjad”
<http://www.Papua.go.id/bps/LEFT%FRAME%20WEB%202005/PENDU%20DUK/SUKU%20BANGSA%20ASLI%20PAPUA%20MENURUT%20MURUT%20URUTAN%20ABJAD.htm>
- Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai kebijakan publik, Bandung: Alfabeta
- Iva Rachmawati, Papua simpul Jamrud Khatulistiwa, Yogyakarta; ASW AJA
- Keban.Yeremias., Enam dimensi strategis administrasi publik konsep, Teori, Dan Isu, Yogyakarta; Gava Media
- Kamus Saku Ilmiah Populer edisi 6, Jakarta; GAMA
- Mudhar, Ahmad. 2011. Otonomi khusus papua; sudahkah berimplikasi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat papua

<http://alsaindonesia.org/site/otonomi-khusus-papua-sudahkah-berimplikasi-terhadap-kesejahteraan-dan-kemakmuran-rakyat-papua/>

- Riduawan,2008. Metode dan teknik menyusun tesis, Bandung; Alfabeta
- Sugiyono, 2008, statistika untuk penelitian, Bandung; Alfabeta
- Soebu, Barnabas.2008. otonomi khusus Papua, Masa

Sumber dari lembaga pemerintahan

- Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua